

PENGARUH TRANSPARANSI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Anang Tri Wibowo¹, Eni Dwi Suslianti²

Program Studi Akuntansi, STIE SBI Yogyakarta

*Email: anangkemalang@gmail.com¹, eni.suslianti@gmail.com²

ABSTRACT

Purpose: This research aims to determine the influence of budget transparency and financial accountability on community satisfaction in Kemalang District, Klaten Regency, Central Java Province. By conducting this research, the researcher hopes that the results of this research can be used as material for evaluation and consideration by the Kemalang District Government in an effort to increase community satisfaction in Kemalang District.

Method: This type of research is quantitative research with a total of 111 respondents. This number was obtained using a purposive sampling method. Data collection was carried out using the questionnaire method. The analytical method used is the descriptive analysis method. The measurement tool used to obtain the final research results is the SPSS application

Finding: Partial and simultaneous research results show that budget transparency and financial accountability jointly influence community satisfaction in Kemalang District, Klaten Regency, Central Java Province.

Novelty: The novelty of this research lies in its location in the Kemalang District of Klaten Regency. This study also included the variable of public satisfaction.

Keywords:

Budget Transparency, Financial Accountability, Community Satisfaction

PENDAHULUAN

Dengan meluncurkan Undang-Undang No. 12 tahun 2008, pemerintah merubah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan otonomi dan kewajiban bantuan. Tujuan dari revisi ini adalah untuk mempercepat peningkatan layanan, *empowerment*, peran, dan masyarakat sambil mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, ekspresi, dan keadilan. Pertama, pemerintah daerah dapat menghasilkan uang untuk menjalankan organisasi. Kedua, mereka melihat peran mereka dalam meningkatkan kapasitas ekonomi wilayah mereka. Oleh karena itu, daripada bergantung pada pemerintah pusat, pemerintah daerah harus berusaha menemukan sumber daya keuangan mereka sendiri.

Penyusunan anggaran yang transparan dan terbuka bagi masyarakat umum di tingkat pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan administrasi publik, terutama pelaporan keuangan. Transparansi dalam APBD adalah salah satu alat untuk mewujudkan *Good Governance*. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas publik, anggaran diperlukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki pemerintah dengan baik (Mulyadi, 2018). Akuntabilitas didefinisikan secara luas dan sempit. Secara luas, akuntabilitas mengacu pada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Secara sempit, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi pertanggungjawaban tersebut (Mahsum, 2013).

Dalam menentukan sikap atas pelayanan ataupun kinerja dari pemerintah daerah sampai pada desa tentunya ada penilaian oleh masyarakat, hal tersebut bisa dikatakan sebuah kepuasan. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Saat ini, survei kepuasan masyarakat banyak digunakan oleh lembaga pemerintah untuk mengumpulkan umpan balik. Pemerintah melakukan survei kepuasan masyarakat yang fokus pada masyarakat. Hal ini jelas karena masyarakat

adalah pengguna layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan perubahan sikap mereka setelah menerima layanan publik, pemeringkatan tentang fitur kualitas tertentu dari layanan publik, alasan mengapa mereka tidak puas atau tidak menggunakannya, dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Kepuasan masyarakat bisa tercapai dengan adanya transparansi dari pengelolaan keuangan dari titik paling rendah adalah Desa. Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pasal 68-72 Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa kepala desa harus memberikan dokumen berikut kepada masyarakat desa dan BPD: 1) Laporan tentang realisasi APBDesa; 2) Laporan tentang realisasi program dan kegiatan, termasuk program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa; 3) Laporan tentang kegiatan yang belum selesai dan/atau belum terlaksana; 4) Laporan sisa anggaran (SiLPA APBDesa); 5) Alamat Pengaduan.

Menurut Mardiasmo (2005) transparansi adalah ketika pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada orang yang membutuhkannya tentang cara pemerintah mengelola sumber daya publik. Karena tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang baik, transparansi telah menjadi salah satu dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam sistem politik, sosial, sosial, dan ekonomi yang disebabkan oleh arus reformasi, permintaan publik meningkat. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik karena pelayanan publik telah tercemar oleh berbagai tindakan, kegiatan, dan modus yang tidak sehat, didominasi oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Khairudin & Erlanda, 2016).

Selain transparansi laporan keuangan, informasi tentang akuntabilitas keuangan desa kepada masyarakat tentunya menjadi pertimbangan dalam kepuasan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Akuntabilitas mengacu pada pengelolaan kebijakan sumber daya yang telah diberikan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara berkala. Fakta yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memberi pengaruh kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah adalah dimana akuntabilitas sendiri bekerja untuk menata dan mengatur pendapatan organisasi perangkat daerah agar dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) dan publik. Dengan adanya akuntabilitas di dalam organisasi perangkat daerah (OPD), maka dapat memperkuat sistem dan lembaga berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku. Akuntabilitas juga berdampak secara langsung pada peningkatan tata kelola keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah Kecamatan Kemalang yang berkualitas.

Informasi mengenai keuangan Desa dan BPD dapat ditemukan dalam buku saku, infografis, atau pengumuman yang didistribusikan di Internet, atau dapat ditemukan di papan pernyataan dan situs strategis desa. Anggaran pemerintah daerah adalah rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran dalam unit moneter, serta merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi finansial suatu organisasi atau kelompok (Arimanondang et al., 2022). Gambaran tersebut meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, serta estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis para stakeholder pemerintah daerah. Anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada pembukaan Rakernas Akuntansi tahun 2009 Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta pernah menyampaikan bahwa seluruh elemen pemerintahan, harus bekerja lebih baik dalam pengelolaan sarana dan prasarana masyarakat (Keuangan Negara, Red). Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas pemerintah di hadapan masyarakat. Apabila tidak dilakukannya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dikhawatirkan akan terjadi *political accountability* seperti pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, ataupun perubahan sistem. Bupati Klaten Sri Mulyani meminta semua perangkat desa untuk menunjukkan transparansi dalam pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dengan memasang banner di depan kantor desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahriadi et al. (2021), ada beberapa tantangan yang sangat penting terkait dengan penyelewengan anggaran desa yang masih belum diatasi dengan baik. Ini termasuk kurangnya penegakan hukum karena pengawasan pusat ke desa yang kurang, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam hal kewenangan pemerintah desa, prosedur penyusunan anggaran desa yang partisipatif, operasi administrasi desa, dan hubungan kekuasaan dalam pemberian bantuan. Setelah reposisi penyelenggaraan pembangunan desa dari pemerintah daerah (*Top Down*) ke pemerintah desa (*Bottom Up*), posisi kepala desa menjadi pusat pembangunan desa, yang mengakibatkan besarnya kewenangan pemerintah desa dan menempatkan posisi kepala desa sebagai pusat pembangunan desa. Selain itu, tidak ada lembaga tingkat desa yang memiliki otoritas yang kuat untuk mengawasi (*checks and balances*) pembangunan desa, agar mencegah kepala desa berperilaku koruptif.

Di Indonesia, ada banyak alasan yang dapat menyebabkan kepala desa melakukan korupsi, termasuk tingkat moral dan intelektual para pemimpin masyarakat yang rendah. Di Indonesia, faktor utama yang berpotensi menyebabkan kepala desa terpilih melakukan tindak pidana korupsi adalah biaya politik yang mahal (*Cost Politics/Money Politics*) selama pilkades. Biaya politik yang mahal cenderung menuntut kepala desa terpilih untuk mengembalikan modal politik selama pilkades. Di sisi lain, korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesempatan, pengaruh lingkungan, hukum atau peraturan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, dan keinginan untuk memperoleh uang dengan cepat dan mudah. Semua faktor ini dapat mendorong kepala desa untuk melakukan tindakan korupsi (Wibawa et al., 2021).

Sehingga, dari fenomena tersebut dapat dipahami bahwa peran transparansi dan akuntabilitas sangat penting sekali sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berhubungan dengan administrasi publik daerah. Oleh karena itu, sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam rangka terwujudnya *Good and Clean Governance* (Helmizar et al., 2017).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavia (2020), sangat penting bagi entitas untuk bertanggung jawab atas penyediaan informasi karena masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tetapi juga mengetahui tindakan yang dianggarkan. Dalam teori Keagenan (*Agency Theory*), Pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, mengungkapkan, dan kemudian melaporkan semua tindakannya yang bertanggung jawab kepada pemimpin, dan kepada *principal* yang berwenang meminta pertanggungjawabannya di masa depan (Yanti, 2020).

Transparansi pengelolaan keuangan desa berarti bahwa uang yang ada dikelola secara transparan dan tidak tersembunyi dari masyarakat dan dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Dengan transparansi ini, pihak lain yang berwenang mungkin memiliki kendali dan pengawasan atas keuangan desa. Untuk keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan mencegah konflik di masyarakat desa, prinsip transparansi sangat penting (Yanti, 2020). Laporan keuangan yang transparan, tersedia dan mudah diperoleh oleh masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memberikan kemudahan dan menyediakan data-data yang berhubungan dengan informasi pelaksanaan program dan sebagian aktivitas keuangan pemerintah melalui website pemerintah daerah (Nurritziana et al., 2017).

Ada banyak keuntungan besar dari transparansi (Hasanah, 2021), termasuk mencegah stakeholder dalam sebuah organisasi melakukan kesalahan; Lebih mudah untuk menemukan kekurangan dan kelebihan kebijakan; meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja lembaga; meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu; dan memperkuat hubungan sosial baik antara masyarakat dengan pemangku kebijakan maupun masyarakat dengan masyarakat. Mampu meningkatkan kepastian usaha dan menciptakan iklim investasi yang menguntungkan.

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja OPD. Meningkatnya transparansi akan meningkatkan Kinerja OPD (Hasanah, 2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa berdampak positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa. Dengan kata lain, semakin transparan atau terbuka pemerintah desa, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan semakin akuntabilitas pemerintah desa, semakin besar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa (Prayogi, 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahdika (2021), penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan masih ada data dan fakta yang tidak relevan. Transparansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

H1: Transparansi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat

Penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sudah memenuhi syarat yang relevan dan andal. Maka Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ini berarti bahwa peran akuntabilitas di organisasi sektor pemerintahan sudah menerapkan dengan maksimal (Mardatilla, 2022). Pemerintah desa, sebagai pengendali pembangunan dan pengelola keuangan, harus melakukan akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap kelompok sasaran atau masyarakat. Prinsip akuntabilitas ini mengatakan bahwa pemerintah desa dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan kinerjanya. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran untuk kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan prinsip ini, pemerintah dan aparat desa harus bertanggung jawab dan melaporkan secara tertib setiap kegiatan kepada masyarakat dan jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, prinsip akuntabilitas harus diterapkan. Akibatnya, pemegang amanah harus bertanggung jawab dengan menyampaikan dan memberikan laporan keuangan desa kepada masyarakat, yang merupakan kelompok sasaran dalam kasus ini (Yanti, 2020). Artinya, semakin tinggi variabel kepercayaan masyarakat, semakin baik variabel akuntabilitas pemerintah (Oktavia, 2020).

Apabila, pemerintah bertanggung jawab atas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa, maka kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan meningkat. Indikator yang mempengaruhi akuntabilitas yaitu penyusunan anggaran yang sangat baik sesuai dengan prinsip penganggaran dan audit yang dilakukan oleh inspektorat dan pemerintah daerah (Aji et al., 2021).

Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi keuangan yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan kurangnya edukasi pemerintah desa sehingga masyarakat kurang responsif terhadap pertanggungjawaban keuangan dana desa (Susliyanti & Binawati, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Basuki (2013) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada pemerintah daerah (Nurritziana et al., 2017).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji et al. (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat. Akuntabilitas keuangan dinilai baik apabila pemerintah daerah memiliki penilaian yang sangat baik yaitu penusunan anggaran yang sudah sesuai dengan prinsip penganggaran, kemudian indikator yang mengukur mengenai audit yang dilakukan inspektorat dan pemerintah daerah. Kebaharuan dari penelitian ini adalah bertempat lokasi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga menggunakan variabel kepuasan masarakat.

H2: Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat

Kinerja pemerintah daerah akan dipengaruhi oleh kombinasi sistem pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi. Tujuan sistem pengendalian internal adalah memastikan keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi, dan transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara. Selain berfungsi sebagai pengukur kualitas suatu organisasi, kinerja juga berdampak pada masyarakat karena terdiri dari *input*, yaitu data, proses, dan *output*, termasuk produk pemerintah, kualitas dan produktivitas pegawai, dan

keuntungan, yaitu tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat (Syahdika, 2021). Sehingga, peneliti merumuskan hipotesis berikut:

H3: Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kuantitatif yang menggunakan data primer dan sekunder yaitu, kuesioner yang sebar kepada responden serta jurnal, artikel, website, dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Kuesioner yang akan diberikan kepada responden menggunakan skala *Likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur transparansi anggaran, akuntabilitas keuangan, dan kepuasan masyarakat. Adapun alternatif jawaban adalah Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Cukup Setuju (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).

Lokasi pada penelitian ini adalah Kecamatan Kemalang yang memiliki sejumlah keunikan dibandingkan 25 kecamatan lain di Kabupaten Klaten. Wilayah kecamatan tidak hanya terluas, tetapi juga berada di posisi tertinggi di lereng Gunung Merapi serta menjadi kecamatan tersepi. Berdasarkan data Klaten Dalam Angka 2023 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), baru-baru ini, wilayah Kemalang memiliki luas 51,66 kilometer persegi (km²) yang berarti 7,88 persen dari total luas wilayah Klaten yang mencapai 655,56 km². Dari 13 desa itu, paling luas adalah Balerante yang luasnya mencapai 8,31 km², disusul Desa Sidorejo seluas 7,05 km² sedangkan desa paling kecil yakni Talun yang luasnya 2,01 km².

Proses pengambilan data secara langsung beberapa diantaranya dilakukan dengan door to door by name, rapat pertemuan antara perangkat desa atau masyarakat dan pertemuan aparat kecamatan dengan masyarakat. Responden dalam penelitian ini yakni perangkat desa, unsur dinas Kecamatan, lembaga Desa dan unsur masyarakat di Kecamatan Kemalang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 15 Februari – 7 Maret 2024.

Ada beberapa karakteristik responden dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan: karakteristik responden untuk kategori perangkat Desa sebanyak 26 orang (23,4%). Kategori unsur dinas Kecamatan sebanyak 21 orang (18,9%). Kategori lembaga Desa sebanyak 5 orang (4,5%). Sedangkan, kategori unsur masyarakat sebanyak 59 orang (53,2%). Sehingga, total responden dalam penelitian ini adalah 111 orang dan telah memenuhi kriteria sampel, dengan responden terbanyak ialah unsur masyarakat.
2. Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja: karakteristik responden berdasarkan masa kerja 0 tahun sebanyak 56 orang (50,5%), masa kerja < 5 tahun sebanyak 9 orang (8,1%), masa kerja 5-10 tahun sebanyak 19 orang (17,1%), masa kerja > 10 tahun sebanyak 27 orang (24,3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden paling banyak berjumlah 56 orang (50,5%) dengan masa kerja 0 tahun.
3. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Akhir: karakteristik responden berdasarkan pendidikan akhir kategori SMA sebanyak 59 orang (53,2%), kategori D3 sebanyak 20 orang (18,0%), kategori S1 sebanyak 25 orang (22,5%), dan kategori S2 sebanyak 7 orang (6,3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden paling banyak berjumlah 59 orang (53,2%) dengan pendidikan akhir SMA.
4. Karakteristik Responden berdasarkan Umur: karakteristik responden berdasarkan umur kategori < 25 tahun sebanyak 35 orang (31,5%), 25-30 tahun sebanyak 31 orang (27,9%), dan kategori > 30 tahun sebanyak 45 orang (40,5%). Hal ini menunjukkan bahwa responden paling banyak berjumlah 45 orang (40,5%) dengan kategori umur responden > 30 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparasi Anggaran	111	3.00	5.00	3.8288	.48381
Akuntabilitas Keuangan	111	1.00	5.00	3.8378	.59606
Kepuasan Masyarakat	111	1.00	5.00	3.8919	.59316
Valid N (listwise)	111				

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 1 hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa hasil nilai Transparansi Anggaran memiliki nilai minimal 3, nilai maksimum 5 dan nilai rata-rata 3,8288 dengan standar deviasi 0,48381 dari 111 responden. Hasil analisis Akuntabilitas Keuangan memiliki nilai minimal 1, nilai maksimum 5 dan nilai rata-rata 3,8378 dengan standar deviasi 0,59606 dari 111 responden. Hasil analisis Kepuasan Masyarakat memiliki nilai minimal 1, nilai maksimum 5 dan nilai rata-rata 3,8919 dengan standar deviasi 0,59316.

Hasil Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Transparansi Anggaran

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Transparansi Anggaran (X1)	Butir 1	0.488	0.1848	Valid
	Butir 2	0.667	0.1848	Valid
	Butir 3	0.599	0.1848	Valid
	Butir 4	0.675	0.1848	Valid
	Butir 5	0.573	0.1848	Valid
	Butir 6	0.616	0.1848	Valid
	Butir 7	0.621	0.1848	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Transparansi Anggaran di atas menunjukkan bahwa r hitung berada diantara 0.488-0.675, nilai tersebut telah lebih besar dari r tabel (0.1848). Dengan demikian seluruh butir pertanyaan pada variabel Transparansi Anggaran dinyatakan **Valid**.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Keuangan

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan (X2)	Butir 1	0.745	0.1848	Valid
	Butir 2	0.817	0.1848	Valid
	Butir 3	0.685	0.1848	Valid
	Butir 4	0.766	0.1848	Valid
	Butir 5	0.629	0.1848	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Akuntabilitas Keuangan di atas menunjukkan bahwa r hitung berada diantara 0.745-0.817, nilai tersebut telah lebih besar dari r tabel (0.1848). dengan demikian seluruh butir pertanyaan pada variabel Akuntabilitas Keuangan dinyatakan **Valid**.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Kepuasan Masyarakat

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepuasan Masyarakat (Y)	Butir 1	0.753	0.1848	Valid
	Butir 2	0.896	0.1848	Valid
	Butir 3	0.729	0.1848	Valid
	Butir 4	0.718	0.1848	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Kepuasan Masyarakat di atas menunjukkan bahwa r hitung berada diantara 0.718-0.896, nilai tersebut telah lebih besar dari r tabel (0.1848). dengan demikian seluruh butir pertanyaan pada variabel Kepuasan Masyarakat dinyatakan **Valid**.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas penerapannya menggunakan uji *Cronbach Alpha*. Kuisisioner dalam penelitian dapat dikatakan reliabilitas jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Transparansi Anggaran	0.704	Reliabilitas Tinggi
Akuntabilitas Keuangan	0.753	Reliabilitas Tinggi
Kepuasan Masyarakat	0.772	Reliabilitas Tinggi

Sumber: Data Primer diolah 2023

Menurut (Ghozali, 2018) suatu kuisisioner dikatakan reliable jika *cronbach alpha* (α) > 0,60. Semakin nilai alpha mendekati satu, maka nilai reliabelnya semakin terpercaya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki reabilitas tinggi (Arikunto, 2016:239). Maka, dapat disimpulkan bahwa semua butir variabel penelitian tersebut adalah reliabel dan dapat digunakan dengan semestinya sebagai instrumen penelitian.

Hasil Uji Hipotesis Analisis Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		<i>t</i>	Sig.
	<i>B</i>	Std. Error	<i>Beta</i>			
1 (Constant)	.130	1.235			.105	.917
Transparansi Anggaran	.233	.056	.312	4.142	.000	
Akuntabilitas Keuangan	.478	.065	.555	7.368	.000	

Sumber: Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 6 hasil uji analisis linear berganda dengan dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$\text{Kepuasan Masyarakat (Y)} = 0,130 + 0,233X^1 + 0,478X^2 + \epsilon$$

Dari analisis bentuk persamaan diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi Transparansi Anggaran (X^1) sebesar 0,233 artinya, setiap kenaikan 1% pada Transparansi Anggaran maka Kepuasan Masyarakat akan meningkat sebesar 0,233. Kemudian, signifikasi Transparansi Anggaran $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hipotesis pertama (H_1) yaitu Transparansi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat, **diterima**.
2. Koefisien regresi Akuntabilitas Keuangan (X^2)sebesar 0,478 artinya setiap kenaikan 1% pada Akuntabilitas Keuangan maka Kepuasan Masyarakat akan meningkat sebesar 0,478. Kemudian, signifikasi Akuntabilitas Keuangan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hipotesis kedua (H_2) yaitu Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat, **diterima**.

Hasil Analisis Uji F (Simultan)

Tabel 7 Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	<i>F</i>	Sig.
1 Regression	340.615	2	170.308	87.995	.000 ^b
Residual	209.025	108	1.935		
Total	549.640	110			

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 7, nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat. Maka Hipotesis ketiga (H_3), **diterima**.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.787 ^a	.620	.613	1.391

Sumber: Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,613. Maka variabel Kepuasan Masyarakat yang dijelaskan oleh variabel Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 61,3% dan sisanya sebesar 38,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kepuasan Masyarakat

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat kecamatan Kemalang diterima karena transparansi anggaran merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Adanya transparansi anggaran memberikan rasa aman bagi masyarakat karena masyarakat memahami bagaimana uang mereka digunakan, dikelola, dan mampu memastikan bahwa telah digunakan secara efisien dan efektif. Adanya rasa aman tersebut, maka masyarakat mempunyai keyakinan tinggi terhadap pengelola keuangan, sehingga berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dan relevan dengan hasil penelitian Hasanah (2021) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2021) yang menyimpulkan bahwa transparansi tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Kepuasan Masyarakat

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat kecamatan Kemalang diterima karena terdapat keterkaitan yang erat antara akuntabilitas keuangan terhadap kepuasan masyarakat. Dengan akuntabilitas keuangan yang berkualitas, masyarakat merasa yakin dan aman bahwa keuangan yang mereka berikan kepada pemerintah kecamatan Kemalang digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat kecamatan Kemalang.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurrizkiana et al. (2017) dan Oktavia (2020) yang membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Akuntabilitas keuangan atas kegiatan atau tindakan bertujuan untuk mengurangi perspektif negatif dari masyarakat. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Susliyanti & Binawati (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa.

Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kepuasan Masyarakat

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat kecamatan Kemalang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan keduanya mempunyai pengaruh yang sama pentingnya dalam membangun kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian Rahmawati & Basuki (2013), yang menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah berdampak positif dan

signifikan pada kepuasan dan kepercayaan stakeholder atau masyarakat. Hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian Prayogi (2019), yang menemukan bahwa faktor transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa berdampak positif dan signifikan pada partisipasi masyarakat dalam pembahasan.

KESIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara umum hasil penelitian berimplikasi bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan telah dilakukan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dan mendapatkan kepuasan oleh kinerja pemerintah Desa Kemalang pada penelitian ini.

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah lokasi atau tempat penelitian tidak bisa menjadi tolak ukur yang bisa merepresentasikan setiap daerah atau desa di Indonesia. Lalu, untuk saran atau masukan kepada pemerintah desa Kemalang, hendaknya tetap menjaga transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan serta baiknya menginformasikan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program desa dan berapa besar anggaran yang turun dari pemerintah, baik melalui website resmi Desa Kemalang maupun kepada masyarakat secara langsung. Saran bagi penelitian selanjutnya, agar bisa menambahkan variabel diluar penelitian ini seperti Sistem Informasi dan Partisipasi Masyarakat, serta menggunakan metode Mix Method (Metode Campuran) yaitu kualitatif dan kuantitatif.

REFERENSI

- Aji, B. S., Suseno, N. S., & Rosmayati, I. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Pelayanan Kantor Desa Sukaratu saat Pandemi Covid-19 terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.52434/jwa.v6i1.1721>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Arimanondang, P. D., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(3), 1–13. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/download/8031/2444>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U. (2021). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Studi Kasus Desa Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun Tahun 2018-2020*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Helmizar, Sukmalalana, & Darma, T. S. (2017). *Akuntabilitas & Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Khairudin, & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 137–154. <https://doi.org/10.36448/jak.v7i2.752>
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 324–336. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.254>
- Mahsum. (2013). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Rajagrafindo Persada.

- Mardatilla, S. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [Universitas Islam Sultan Agung]. In *Universitas Islam Sultan Agung*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik; Penentuan Harga Pelayanan Publik*.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya* (5th ed.). YKPN.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Oktavia, N. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma*.
- Prayogi, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntailitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulung Wetan). In *Universitas Islam Indonesia* (Vol. 53).
- Rahmawati, N. E., & Basuki, H. (2013). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Stakeholder. In *Universitas Gajah Mada*.
- Suryani, P. (2021). Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi Dan Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness*, 9(1), 33–44. <https://doi.org/10.33369/fairness.v9i1.15220>
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *EFEKTIF Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 11(1), 1–12.
- Syahdika, A. V. P. (2021). *Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten BOGOR)*. UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Yanti, R. D. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran dengan Etika Kerja Islam sebagai Variabel Moderasi (Studi pada* <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19774/>